

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit	Halaman :	08
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post	Tabangan	<input checked="" type="checkbox"/>	

PDAM Usul Tarif Air Naik

PULANG PISAU - Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulang Pisau, Sis Hernawa mengusulkan kenaikan tarif air bersih, meski mengakui hal itu menjadi dilema, baik dari sisi pemenuhan operasional maupun secara politis. "Usulan rencana kenaikan tarif ini pasti menimbulkan pro dan kontra, tetapi bagi PDAM kenaikan tarif ini bisa menutup biaya operasional agar bisa terus memberikan pelayanan air bersih kepada para pelanggan," kata Sis Hernawa, beberapa hari lalu.

Dikatakan Sis Hernawa, dari hasil audit yang dilakukan kepada PDAM setempat dinyatakan sehat secara manajemen, tetapi dukungan untuk meningkatkan operasional masih dibutuhkan. Dari laporan evaluasi kerja yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu saran dan masukan yang diberikan adalah mengusulkan kepada pemerintah daerah terkait dengan penyesuaian tarif atau subsidi tarif.

"PDAM hanya selaku operator karena kebijakan kenaikan tarif ini ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dari hasil perhitungan saat ini, biaya produksi yang dikeluarkan melebihi dari tarif jual yang diberlakukan," terang dia. Sis Hernawa mencontohkan, biaya

operasional produksi dalam satu meter kubik Rp6.000 berbanding tarif jual air yang diberlakukan sebesar Rp4.500. Artinya pelanggan masih disubsidi pemerintah setempat sebesar Rp1.500. Sementara, bahan baku dan kimia untuk pengolahan air serta operasional lain terus mengalami kenaikan.

Sudah lama pemerintah daerah belum memberlakukan kenaikan penyesuaian tarif baru agar biaya produksi dan harga jual air menjadi berimbang atau "full cost recovery" (FCR). Terkait kemungkinan kenaikan penyesuaian tarif diperlukan hingga 50 persen, Sis Hernawa menjelaskan bahwa kenaikan 50 persen itu untuk memenuhi FCR. Namun, semua tergantung dari pemerintah daerah setempat.

Untuk menutup biaya operasional selama ini, pemerintah setempat mengandalkan penyertaan modal, bukan subsidi tarif. Penyertaan modal lebih kepada belanja barang dan jasa sehingga penggunaannya masih terbatas, tidak bisa untuk menunjang operasional lain yang dibutuhkan. Kondisi peralatan pengolahan air yang ada di PDAM saat ini juga sudah mengalami penyusutan hingga kondisi 50 persen, sehingga dibutuhkan dukungan anggaran agar operasional PDAM bisa tetap terus berjalan, salah satunya dengan penyesuaian tarif sesuai FCR. ist